

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DALAM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DI DESA GUNUNG TUA JAE KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

OLEH :

KHOIRUN NISA LUBIS

198520200



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DALAM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DI DESA GUNUNG TUA JAE KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

**KHOIRUN NISA LUBIS
198520200**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

HALAMAN PENGESAHAN

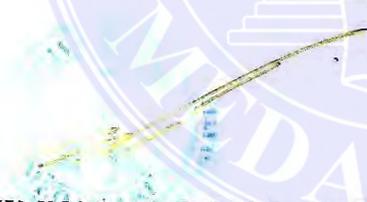
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di
Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal
Nama : Khoirun Nisa Lubis
NPM : 198520200
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


Yurial Arief Lubis, S.Sos., M.IP
Pembimbing I


Khairunnisah Lubis, S.Sos., M.I.Pol
Pembimbing II

Mengetahui


Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP
Dekan Fakultas ISIPOL


Dr. Drs. Indra Muda, M.AP
Ka.Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus: 24 Januari 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 Januari 2024



Khoirun Nisa Lubis
NPM : 198520200

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khoirun Nisa Lubis
NPM : 198520200
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peranana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 24 Januari 2024
Yang menyatakan

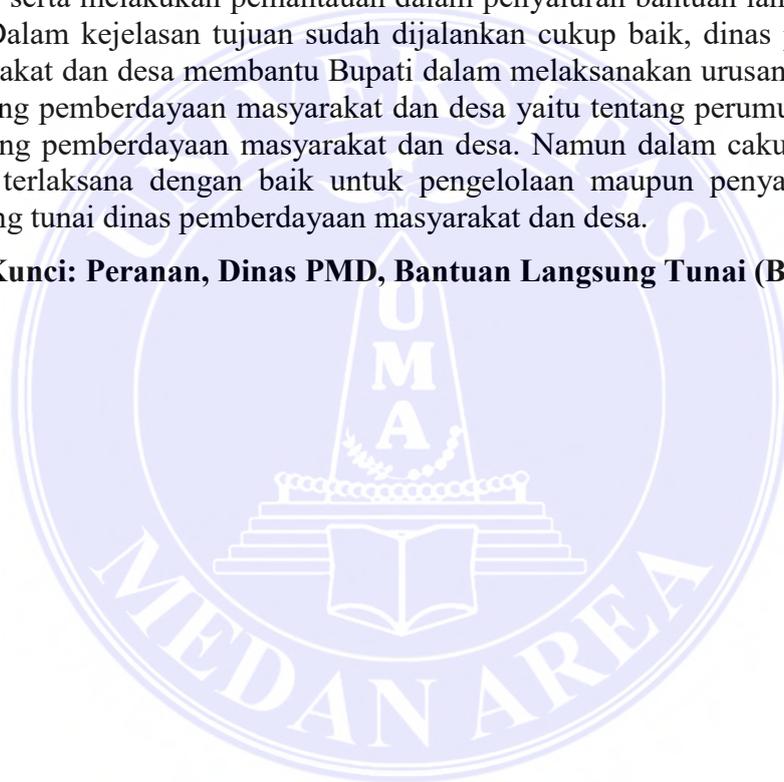


(Khoirun Nisa Lubis)
NPM : 198520200

ABSTRAK

Peranan adalah kewajiban seseorang dalam suatu pekerjaan. Kurangnya peran dari pemerintah dan sosialisasi antara masyarakat penerima bantuan dengan pemerintah desa menjadi sebuah permasalahan dalam pengelolaan bantuan langsung tunai. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal serta mengetahui faktor penghambatnya. Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara kewenangan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa telah mengetahui apa kewenangannya dengan baik. tanggung jawab telah dilaksanakan dengan cukup baik, dibuktikan dengan tanggung jawabnya dalam menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bapak Bupati, serta melakukan pemantauan dalam penyaluran bantuan langsung tunai di desa. Dalam kejelasan tujuan sudah dijalankan cukup baik, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu tentang perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Namun dalam cakupan pekerjaan belum terlaksana dengan baik untuk pengelolaan maupun penyaluran bantuan langsung tunai dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

Kata Kunci: Peranan, Dinas PMD, Bantuan Langsung Tunai (BLT)



ABSTRACT

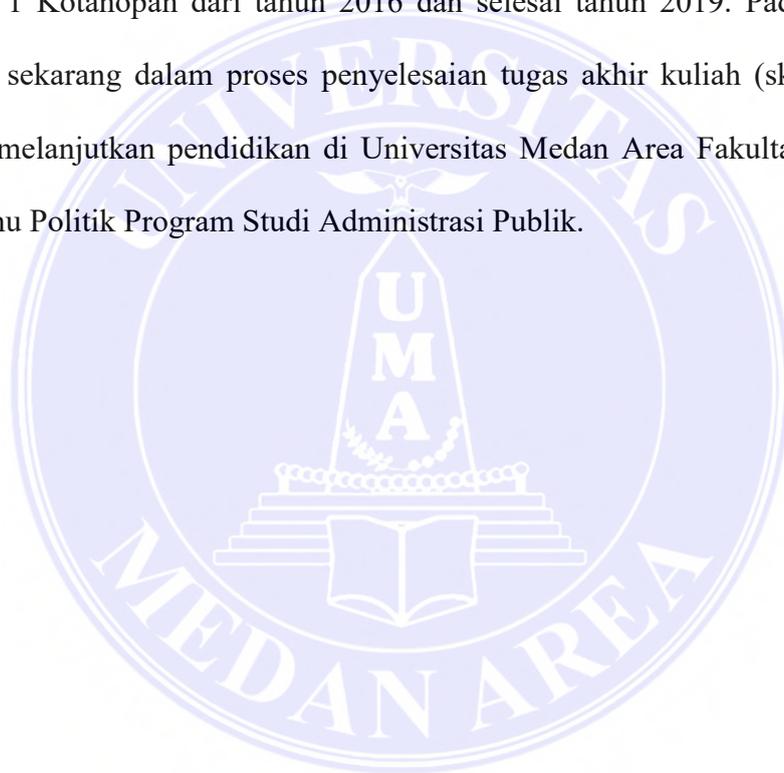
Role is a person's obligation in a job. The lack of government role and socialization to village aid recipient communities is a problem in managing BLT. This paper aims determine the role of Community and Village Empowerment Office in management BLT in Gunung Tua Jae village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency and find out the inhibiting factors. This research method is descriptive qualitative. The results of study concluded that empowering service authority of people and villages has been well done. The responsibility has been adequately carried out. In clarity the purpose of the community and village empowerment service was good enough. In terms of work, it has not been done well for both management and direct aid distribution of public and rural services.

Keywords: Role, PMD service, direct cash help (BLT)



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Khoirun Nisa Lubis lahir di Kotanopan, 01 April 2001. Anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Arjun Lubis dan Ibu Saudah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Kotanopan tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kotanopan dan tamat tahun 2016 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kotanopan dari tahun 2016 dan selesai tahun 2019. Pada tahun 2019 hingga sekarang dalam proses penyelesaian tugas akhir kuliah (skripsi) peneliti masih melanjutkan pendidikan di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil alamin dengan kerendahan hati memanjatkan puji dan syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini dengan judul “PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA GUNUNG TUA JAE, KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL”.

Adapun skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dalam penyusunan tulisan ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materi. Atas bimbingan dan bantuan yang penulis terima dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini, maka dalam kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
3. Dr. Indra Muda, M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP selaku Dosen Pembimbing I penulis.

5. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Dosen Pembimbing II penulis.
6. Bapak Hikmawan Syahputra, S.IP,M.A selaku sekretaris dalam membimbing penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Semua informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua yang saya sayangi yaitu Ayahanda Arjun Lubis dan Ibunda tercinta Saudah, Abang dan Kakak tercinta yang telah banyak berkorban moril maupun materil dan terus dengan tulus tanpa henti serta mendukung harapan besar kepada saya untuk dapat berkuliah dengan baik. Semoga kasih sayang mereka tetap menemani saya dalam setiap perjalanan hidup saya.
10. Sahabat seperjuangan saya Herlina yang telah membantu dan selalu bersama suka maupun duka dalam proses skripsi saya.

Akhir kata saya mengucapkan terimakasih banyak kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga berkat dan Rahmat-Nya melimpah kepada saya khususnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini, dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2024



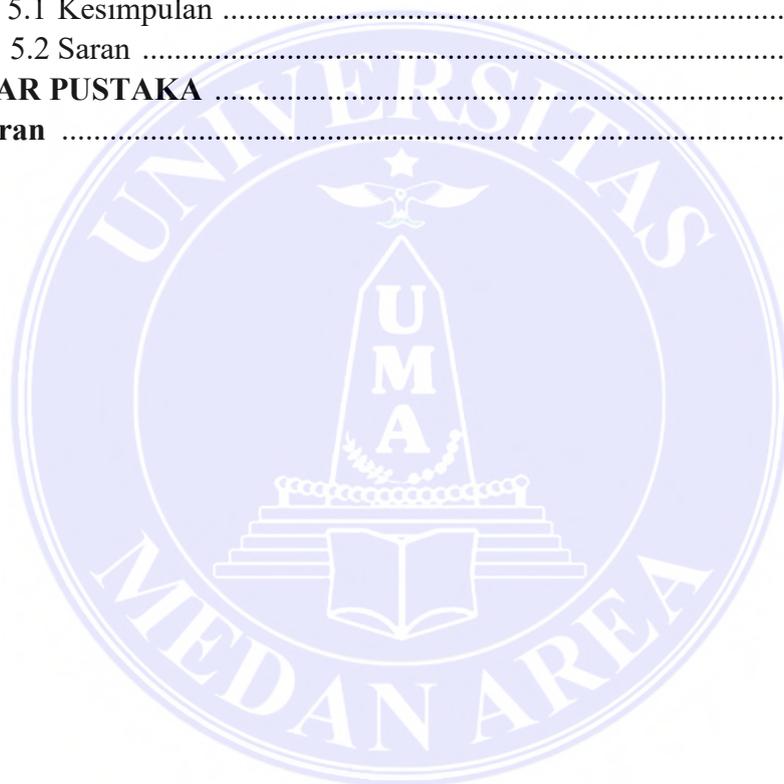
Khoirun Nisa Lubis

198520200

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Peranan	7
2.1.1 Teori Peranan	9
2.3 Pengertian Pengelolaan	12
2.3.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia	13
2.4 Bantuan Langsung Tunai (BLT)	14
2.4.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)	14
2.4.2 Tujuan dan Sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT)	16
2.4.3 Macam-macam Aspek Bantuan Langsung Tunai (BLT)	17
2.4.4 Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)	19
2.4.5 Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)	19
2.4.6 Organisasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)	21
2.4.7 Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT)	23
2.5 Kerangka Berpikir	24
2.6 Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Sumber Data	30
3.3 Sumber / Informan Penelitian.....	31
3.4 Teknik Analisis Data	33
3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Gambaran Umum Desa Gunung Tua Jae.....	37
4.1.2 Jumlah Penduduk Desa Gunung Tua Jae	38
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Gunung Tua Jae Kecamatan	

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	38
4.1.4 Daftar Penerima BLT Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	38
4.2 Pembahasan	41
4.2.1 Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Struktur Organisasi Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	41
4.2.2 Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	49
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
Lampiran	65



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12
Gambar 2 Kerangka Berpikir	26
Gambar 3 Struktur Organisasi Desa.....	38
Gambar 4 Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	40



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2 Jumlah Informan Penelitian	33
Tabel 3 Uraian Waktu Peneltian	35
Tabel 4 Jumlah Penduduk Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal	38
Tabel 5 Daftar Penerima Blt Desa Gunung Tua Jae Tahun 2023 Tahap I.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	65
Lampiran 2. Doumentasi Penelitian.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini salah satunya terlihat dari cita-cita pembangunan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai saat ini pemerintah masih terus melanjutkan sejarah pencarian program kesejahteraan yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik dalam laporan tahunannya tentang Statistik Kesejahteraan Masyarakat Indonesia .

Program-program yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah juga secara rutin melakukan evaluasi atau penilaian dan melakukan perubahan atas programnya. Di antara program-program kesejahteraan yang pernah diterapkan di Indonesia, terdapat dua program unggulan yang sangat dikenal di Indonesia, yaitu program bantuan tunai dan program jaminan kesehatan.

Program Bantuan langsung Tunai (BLT) merupakan program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin. Negara pertama yang pertama kali menerapkan bantuan langsung tunai adalah Brasil, yang selanjutnya diadopsi oleh Negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan

dan mekanisme yang dijalankan pada program bantuan langsung tunai berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di Negara tersebut. Tujuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah agar dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerimaannya adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah ataupun yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Prosedur Penyaluran BLT ini mengacu pada Peraturan Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu dilakukan setiap bulan ketika desa telah menyampaikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa untuk bulan pertama dan realisasi penyaluran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas. Syarat penerimaannya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja. Penerima BLT ini didasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penerapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan pemerintah Desa. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianggarkan dalam APBD Desa maksimal sebesar 35% dari dana desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mandailing Natal menyebutkan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal mengalami kenaikan dari 9,11% pada Maret 2020 menjadi 9,18% pada Maret 2021. Angka ini setara dengan jumlah penduduk miskin yang berada pada kisaran 41,31 ribu

jiwa pada Maret 2021, atau bertambah sekitar 0,67 ribu jiwa dari tahun sebelumnya yaitu 40,64 ribu jiwa, kondisi Maret 2020. Pada tahun 2021 Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 400.721,- per kapita sebulan, meningkat sebesar 12,54% bila dibandingkan tahun 2020 yang hanya Rp. 356.058,- per kapita sebulan (Badan Pusat Statistik, Indikator Kemiskinan, Mandailing Natal : Badan Pusat Statistik, 2019).

Penyebab permasalahan dalam pemberian bantuan langsung tunai yang masih banyak khususnya di masa pandemi Covid-19 bahkan sampai sekarang. Adanya tumpang tindih kebijakan pemerintah terkait bantuan langsung tunai selama Covid-19 yang mengakibatkan adanya kebingungan dalam pelaksanaan serta penyalurannya kepada masyarakat, bantuan sosial yang diberikan juga kurang optimal, dimana tidak adanya kesiapan dari pemerintah serta belum mampu dalam menentukan masyarakat mana yang seharusnya layak menerima bantuan sosial tersebut. Sehingga tujuan awal dari pemberian bantuan sosial tersebut yaitu untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 belum terlaksana dengan baik. Bahkan disetiap masing-masing program bantuan sosial memiliki permasalahannya sendiri.

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah salah satu daerah yang sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Kecamatan Panyabungan terbagi dalam banyak desa, seperti desa Gunung Tua Jae, Gunung Tua Julu, Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kota. Kecamatan Panyabungan Utara terdiri dari Desa Mompang, Rumbio, Sopo Sorik, Kampung Baru, dan lainnya. Desa Gunung Tua Jae juga merupakan daerah yang telah menjalankan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan syarat calon

penerima yaitu keluarga miskin dan sangat miskin, tidak terdaftar dalam program bantuan lain seperti program bantuan Program Keluarga Harapan (dikutip dari <https://kodepos.cepatlakoo.com/sumatera-utara/mandailing-natal/panyabungan> pada tanggal 5 februari pukul 10.00 wib).

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Gunung Tua Jae sudah tersalurkan sesuai yang diinginkan. Bantuan disalurkan sebanyak tiga bulan sekali dengan besaran Rp.300.000 perbulannya. Namun, di tahun 2022 akhir terjadi permasalahan dalam penyaluran BLT yang dimana Pejabat Kepala Desa beserta jajarannya meminta masyarakat penerima BLT menandatangani pencairan BLT tersebut dengan catatan dana tidak dicairkan. Dengan adanya permasalahan tersebut membuat masyarakat desa menjadi ricuh, sehingga Pejabat beserta jajarannya tidak terima dengan beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat penerima BLT. Terjadi perkelahian antara Pejabat Kepala Desa beserta jajarannya dengan masyarakat penerima BLT, sampai masyarakat mengadukan perkara tersebut ke Polres Madina (Wawancara dengan Ibu Warhamni Rangkuti selaku masyarakat desa Gunung Tua Jae).

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa, penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal belum tersalurkan dengan baik. Masih banyak olahan ataupun politik aparat desa dan juga masyarakat miskin yang belum menerima dana BLT. Hal ini terjadi karena kurangnya peran dari pemerintah setempat, sumber daya yang masih terbatas sehingga kurang sosialisasi antara masyarakat penerima bantuan dengan pemerintah desa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik meneliti atau mengkaji lebih dalam mengenai Peranan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (dikutip dari <https://malintangpos.co.id/terkait-pemotongan-blt-dd-warga-desa-gunungtua-jae-menempuh-jalur-hukum/>).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apa saja faktor–faktor yang menghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang bagaimana Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Sebagai sumber informasi dalam mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut terminology peranan adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or Duty in undertaking*. Artinya “*tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan*”. Sedangkan secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati : 2017).

Soerjono Soekanto (2002:242) peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi masyarakat.

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Menurut Bruce J.Cohen, peranan memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki satu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul apabila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

2.1.1 Teori Peranan

Peranan (role) merupakan aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran.

Indikator Peranan yang dikemukakan oleh Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013:126) peranan dapat di ukur dengan indikator berikut: Wewenang, Tanggung Jawab, Kejelasan Tujuan, Cakupan Pekerjaan. Berikut adalah uraian penjelasan indikator menurut Pratina (2013):

1) Wewenang

Wewenang adalah merasa pasti dengan seberapa besar wewenang yang dimiliki dan mempunyai rencana yang jelas untuk pekerjaan.

2) Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah situasi seseorang mempunyai tujuan yang jelas untuk pekerjaan dan mengetahui bahwa perlunya membagi waktu dengan tepat.

3) Kejelasan Tujuan

Mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan dengan jelas.

4) Cakupan Pekerjaan

Mengetahui cakupan ataupun ruang lingkup dari pekerjaan dan peranannya. Mengacu pada totalitas tugas dan tanggung jawab dalam posisi tertentu. Untuk mengetahui apakah Dinas Pemberdayaan Masyarakat telah melaksanakan peranannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dengan baik, maka peneliti akan menggunakan Indikator teori peranan oleh Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013:126) sebagai *Grand Theory* (teori utama). Adapun Indikator peran yang dimaksud adalah wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan dan cakupan pekerjaan.

2.2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten di wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) pada Kabupaten tersebut merupakan organisasi perangkat daerah yang membantu Bupati dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Badan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Mandailing Natal salah satu perangkat daerah yang mempunyai visi dan misi dan memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Mandailing Natal.

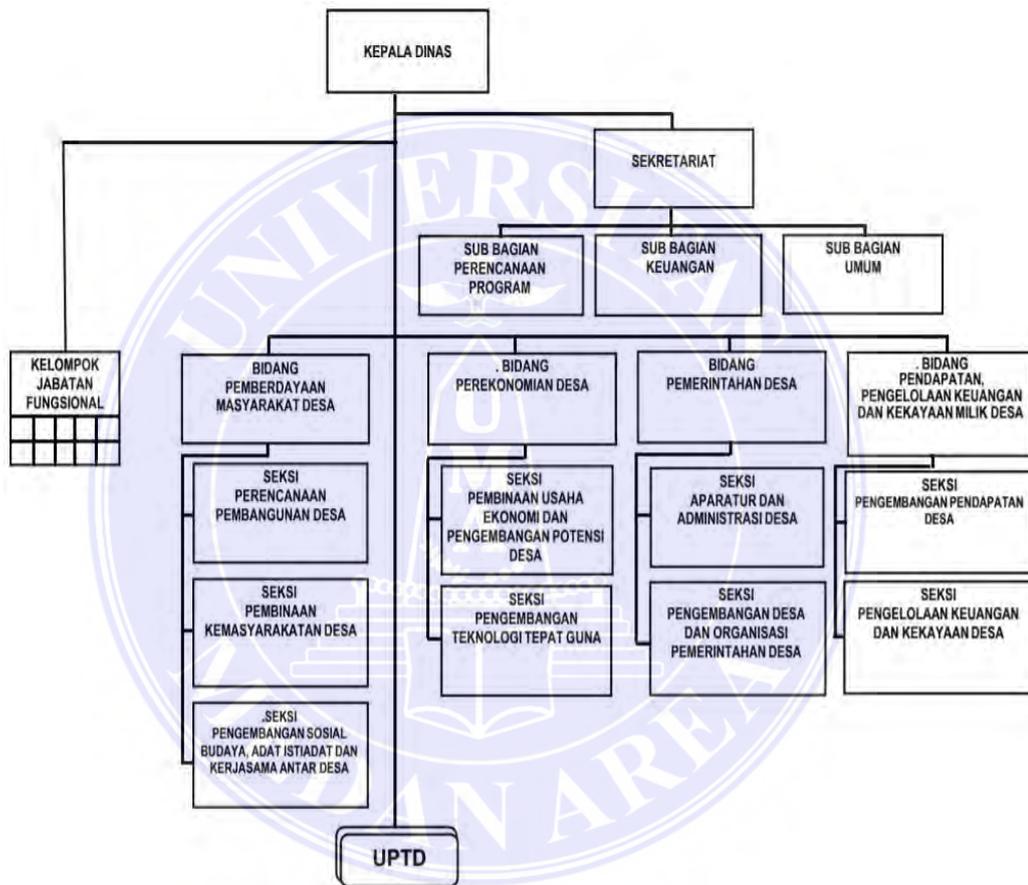
Tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa adalah merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pengelolaan administrasi dinas, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsinya antara lain ;

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugasdan fungsinya.

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Sumber : <https://dpmd.paserkab.go.id/pages/struktur-organisasi>. (2023)

2.3 Pengertian Pengelolaan

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang berarti pengaturan atau pengurusan. Dalam Bahasa Indonesia manajemen diterjemahkan menjadi manajemen atau pengelolaan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu

rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Nugroho (2009:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi (istilah) pengelolaan berasal dari kata kelolah (*tomanage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.

2.3.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Menurut Bintoro dan Daryanto (2017:15) menyatakan bahwa “Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal”.

Menurut Edwin B. filippo dan Malayu S.P Hasibuan (2016:21) fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Perencanaan dalam proses manajemen sumber daya manusia adalah rekrutmen tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian diartikan suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahlian dan menyediakan alat-alat yang diperlukan oleh karyawan dalam menunjang pekerjaan.

c. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses monitoring kegiatan-kegiatan, tujuannya untuk menentukan harapan-harapan yang akan dicapai dan dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

d. Motivasi (*Motivating*)

Motivasi dapat diartikan sebagai pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang untuk mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan bersama.

e. Evaluasi (*evaluating*)

Evaluasi atau disebut juga pengendalian merupakan kegiatan sistem pelaporan yang serasi dengan struktur pelaporan keseluruhan, mengembangkan standar perilaku, mengukur hasil berdasarkan kualitas yang diinginkan dalam kaitannya dengan tujuan, melakukan tindakan koreksi, dan memberikan ganjaran.

2.4 Bantuan Langsung Tunai (BLT)

2.4.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan BLT. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT), ini terbukti cukup berhasil dengan menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di Negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis (Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan). Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan bantuan tunai bersyarat (BTB) atau dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Di awal pelaksanaan program ini di desain hanya untuk kelompok paling miskin agar mendapatkan akses kesehatan bagi ibu dan anak sejak dalam kandungan dan pendidikan sehingga dapat memutus rantai kemiskinan.

Bantuan Langsung Tunai bukan merupakan lanjutan program subsidi langsung tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM (Rumah Tangga Miskin) mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BLT lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. BLT merupakan program bantuan dan perlindungan yang termasuk dalam klaster 1 strategi

penanggulangankemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.

Kesimpulannya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program pemberian bantuan bersyarat kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT dengan tujuan jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.

2.4.2 Tujuan dan Sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai memiliki tujuan, diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

2. Sasaran Bantuan Langsung Tunai

Sasaran BLT merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah sebagai berikut:

- 1) Pesisir (daerah peralihan ekosistem darat dan laut) dan pulau-pulau kecil.
- 2) Daerah terpencil/tertinggal.
- 3) Perbatasan antar Negara.

2.4.3 Macam-macam Aspek Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. BLT Aspek Kesehatan

Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan bahkan untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil yang tidak memadai berakibat pada buruknya kondisi kesehatan dan asupan gizi bayi yang dilahirkan. Kejadian balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia.

2. BLT Aspek Kesejahteraan Sosial

1) Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya. Penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan kemudahan yang berhubungan dengan

kedisabilitasnya dari pihak lain terutama pengasuhan dan perawatan dan keluarganya.

2) Lanjut Usia

Undang-undang No.13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, lanjut usia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Perbaikan perawatan dan penyediaan fasilitas kesehatan serta semakin baiknya gizi masyarakat selama tiga tahun terakhir berdampak pada usia harapan hidup penduduk Indonesia yang membawa konsekuensi meningkatnya jumlah lanjut usia dari tahun ke tahun. Semakin panjangnya usia harapan hidup dapat berimplikasi (terlibat) pada timbulnya permasalahan sosial yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi sehingga permasalahan jumlah lanjut usia terlantar akan cenderung meningkat.

3) BLT Dana Desa

BLT-DD merupakan bantuan uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sesuai Pasal 5 Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2022 tentang tata cara pembagian, penetapan dan penggunaan alokasi dana desa setiap desa Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2022, pengelolaan alokasi dana desa dapat dialokasikan untuk ; kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan

desa, kegiatan bidang pelaksanaan Pembangunan desa, kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan, dan kegiatan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Dalam penelitian ini nantinya lebih memfokuskan terkait bagaimana alokasi ataupun pengelolaan BLT Dana Desa di Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

2.4.4 Kriteria Penerima Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai

Kriteria komponen penerima bantuan sosial BLT adalah sebagai berikut:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - 1) Ibu hamil/menyusui.
 - 2) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi ;
 - 1) Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat.
 - 2) Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat.
3. Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat.
4. Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

2.4.5 Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dalam mewujudkan terlaksananya pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dana desa, pemerintah daerah melalui dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten

Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021. Dalam Pasal 10 tentang Persyaratan Penyaluran Dana Desa ke KPPN melalui Bupati dijelaskan ;

1. Penyaluran Dana Desa dilakukan Pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a) Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen) dengan rincian; 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima; dan 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b) Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) dengan rincian; 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c) Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (duapuluh persen) dengan ketentuan; 1) 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas. 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

2.4.6 Organisasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pelaksanaan program bantuan langsung tunai merupakan departemen sosial selaku kuasa penggunaan anggaran yang dibantu oleh pihak-pihak terikat yang telah ditentukan Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 dalam pelaksanaan Program Bantuan Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Rumah Tangga Sasaran adalah suatu bentuk kinerja yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing, pada lembaga yang bertanggung jawab kepada kelancaran bidang dan tugas masing-masing.

Tugas pokok dan tanggung jawab dari setiap lembaga bisa dilihat dari Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai pada Rumah Tangga Sasaran yang bisa dilihat sebagai berikut:

1. Departemen Sosial

Departemen ini membutuhkan kewajiban dalam menyiapkan modal berdasarkan daftar nominal dan menyampaikan surat perintah Kepala Pos Indonesia untuk dibayar dana Bantuan Langsung Tunai pada rumah tangga sasaran. Kemudian kerja sama dengan PT Pos Indonesia (persero) bisa menyalurkan modal tersebut sesuai dengan daftar nominative penerima

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disampaikan oleh pusat Biro Statistik (BPS).

Pada kejelasan dimana proses penyalurannya, Departemen Sosial berkewajiban dapat membuat dan menyusun cara teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai bersama Bappenas, Menko Kesra, Depdagri, BPS, PT. Pos Indonesia (persero) dan PT.BRI (persero). Dimana tanggung jawab pada pemerintah, Departemen Sosial wajib dibuat laporan pelaksanaan kepada Presiden RI dalam pelaksanaan jalannya dana Bantuan Langsung Tunai kepada presiden RI.

2. Kewajiban PT Pos Indonesia (persero)

Kewajiban dari PT Pos Indonesia dalam program Bantuan Langsung Tunai ini rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak adalah penyimpanan rekening Giro Utama di Bank Cabang Indonesia Veteran. Berdasarkan anggaran dari Departemen sosial yang bisa disalurkan pada rekening Giro. Kantor pos dicetak dan menyalurkan Kartu Kompensasi BBM (KKB) ke KRPK (Kantor Pos Pemerintah) seluruh Indonesia berdasarkan daftar nominative, kemudian KRPK menyalurkan Kartu Kompensasi BBM. Dalam hal ini PT. Pos Indonesia juga bisa melaporkan realisasi jalannya KKB Kepada Departemen Sosial dan kemudian menyampaikan rancangan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

3. Kewajiban Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia memiliki peran penting dalam menyiapkan modal Bantuan Langsung Tunai. PT. Pos Indonesia dan BRI bisa dibebaskan

dana administrasi pembukaan rekening dan dibedakan atas kewajiban setoran awal untuk pembukaan giro.

4. Kewajiban Badan Pusat Statistik

Lembaga ini merupakan peran dan wajib dalam menyediakan data rumah tangga sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikategorikan rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin.

5. Kewajiban Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi

Pada tatanan dinas/Instansi Provinsi dalam proses program Bantuan Langsung Tunai tersebut wajib mengontrol unit pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai pada tingkat Provinsi dan struktur pelaksanaannya, ketua pengelola Unit Pelaksana Program (UPP) Bantuan Langsung Tunai merupakan kepala dinas sosial untuk bertugas dalam insentif selama pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

6. Kewajiban Dinas/Instansi Kabupaten Kota

Pada tingkat jajaran dinas atau lembaga Kabupaten/Kota, pada proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai dimiliki peran dan kewajiban dalam membuat unit pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai.

7. Kewajiban Desa/Kelurahan

Di pantau petugas pos pada pencairan atau penerima Bantuan Langsung Tunai dan pendistribusian kartu pada Rumah Tangga Sasaran. Bersama-sama dengan petugas pos ditentukan yang mengganti Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang pindah/tinggal (tanpa ahli waris) atau yang berhak, melalui musyawarah Desa/Kelurahan yang dihadiri Kepala Desa.

2.4.7 Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Besaran BLT sesuai Pasal 33 ayat (5) PMK 190 Tahun 2021, disebutkan bahwa besaran BLT Dana Desa 2022 ditetapkan sebesar Rp.300.000,- untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat (KPM).

- 1) Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp.600.000 untuk tiga bulan (April, Mei, Juni).
- 2) Setiap KPM menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp.300.000 untuk bulan selanjutnya (Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penyaluran BLT dilakukan sesuai yang sudah dijadwalkan. Hal ini sudah merupakan ketentuan dari Pemerintah Pusat. Jadwal penyaluran pada masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh Unit Pengelola Bantuan Langsung Tunai (UBLT) Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan lembaga pembayaran. Dana bantuan ini dibayarkan langsung kepada peserta BLT dengan pendamping BLT pada lembaga pembayar yang diakses dengan kartu debit yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan sistem pencairan dana dilakukan secara bergantian.

2.5 Kerangka Berpikir

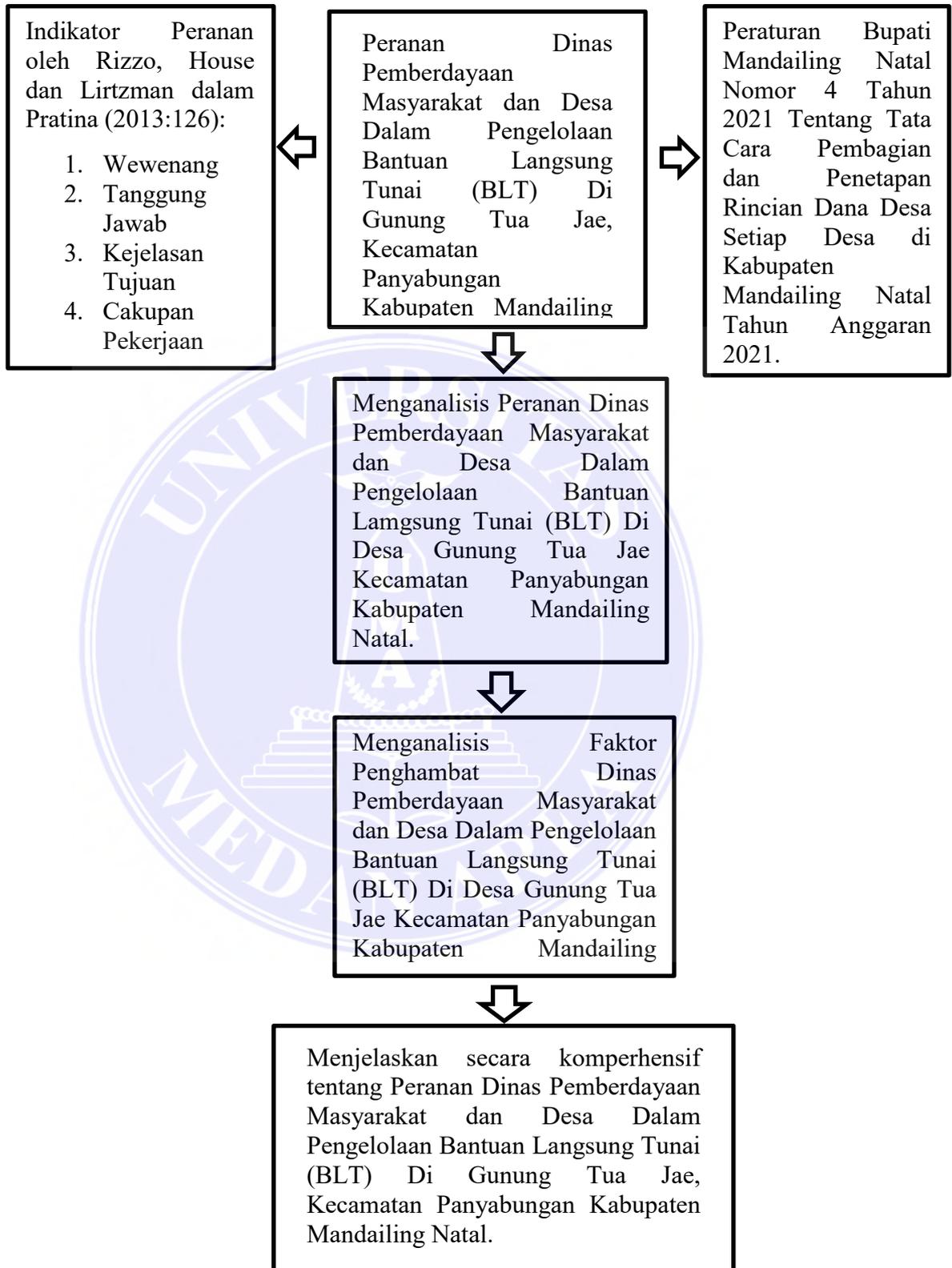
Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2017:60) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dengan demikian kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang paling melandasi pemahaman-pemahaman

lainnya, sebuah pemahaman mendasar dan pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka berpikir ini akan menjelaskan tentang Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dimana dalam penelitian ini menggunakan Teori Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013), dimana indikator peranan dapat diukur dengan indikator wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan dan cakupan pekerjaan. Terkait tentang peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diregulasikan dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021.

Dalam kerangka berpikir ini juga akan membahas bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan apa saja faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan rumusan masalah yang di angkat dalam pembahasan penelitian ini. Dari pemaparan di atas, kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 Kerangka Berpikir



Sumber : Peneliti, 2023

2.6 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu mengenai Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikutip dari beberapa jurnal dan skripsi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tinjauan penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian ini.

Untuk memperjelas mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka berikut disajikan penelitian terdahulu :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Jurnal/Peneliti	Judul Peneliti	Metode dan Hasil Penelitian
1.	Skripsi Fadli Ahmad Borotan, (2020), Mahasiswa Dari Universitas IAIN Padang Sidempuan	Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Manajemen Keuangan Masyarakat Desa Simaninggir Kabupaten Mandailing Natal.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena permasalahan belum jelas, kompleks, dinamis dan penuh makna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Masyarakat desa Simaninggir Kabupaten Mandailing Natal sudah lebih baik. Walaupun bantuan langsung tunai ini memang tidak secara langsung berperan pada peningkatan ekonomi masyarakat desa Simaninggir. Namun program ini membawa manfaat bagi mereka, umumnya manfaat yang diperoleh masyarakat miskin yang menerima bantuan langsung tunai bersifat jangka pendek, yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sembako. Hal ini menunjukkan bahwa peranan bantuan langsung tunai belum sepenuhnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Simaninggir.
2.	Skripsi Burhanudin, 2020, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram	Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui cara observasi dan wawancara, di tunjang pula dengan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut selain itu implementasi Program BLT di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano tidak optimal, karena data yang di pakai tidak di lakukan revisi atau di verifikasi terlebih dahulu. Penyampaian

			BLT ini dibutuhkan data yang valid siapa dan di mana RTS yang pantas menerima BLT tersebut bertempat tinggal.
3.	Skripsi Rahmayanti, 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dikelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan efektifitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Rimba Melintang kurang efektif dilihat pada data olahan hasil penelitian yaitu sebesar 2,9% untuk pilihan efektif, 53,70% untuk pilihan kurang efektif dan 33,33% untuk pilihan tidak efektif.
4.	Jurnal M. Arimbawa, Asdaf Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali	Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar	Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dimana pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data serta verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Batuan sudah baik, secara umum pelaksanaan penyaluran BLT dana desa baik dari tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan pengawasan BLT – Dana Desa sehingga masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah pusat.
5	Skripsi Dessy Laras Wati, 2021 Mahasiswa Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Perekonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan bantuan langsung tunai di nagari simalanggang sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa, namun bantuan ini memang tidak secara langsung berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di masa pandemi, namun umumnya manfaat yang diperoleh masyarakat miskin penerima bantuan bersifat jangka pendek yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sandang maupun pangan.

Sumber : Peneliti, 2023

Berdasarkan paparan diatas, adapun beberapa hal yang akan membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu :

1. Lokus atau tempat penelitian yang berbeda, dimana penelitian ini akan dilakukan langsung ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan berfokus pada bagaimana sistem penyaluran BLT yang masih terkendala. Sedangkan dalam penelitian ini akan berfokus pada bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:147), metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami dan menggambarkan kejadian atau fakta yang terjadi saat penelitian berlangsung.

Dengan metode penelitian ini dapat membantu peneliti dalam memperoleh informasi yang mampu menggambarkan ataupun memaparkan secara jelas terkait bagaimana Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan apa saja faktor penghambat dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

3.2 Sumber Data

1) Data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari lapangan dan belum ada data tersebut sebelumnya, yang termasuk kedalam sumber data primer adalah observasi, wawancara, kuisioner dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data primernya adalah data yang dikumpulkan dari observasi dilapangan dan wawancara kepada beberapa narasumber yaitu Kepala atau anggota perangkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Panyabungan, dan masyarakat sekitar. Data tersebut mengenai masalah bagaimana peranan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

2) Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua dalam arti data-data yang sudah dikumpulkan dan sudah ada sebelumnya. Sumber data sekunder bisa diambil melalui dokumen publik (koran, makalah, laporan kantor/perusahaan), dokumen privat (buku harian, surat, email), dan dokumen resmi adalah segala sesuatu dalam bentuk tulisan, foto, dan rekaman elektronik.

3.3 Subjek/ Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik Nonprobability Sampling yaitu teknik Purposive Sampling, dimana pengambilan sampel atau informan melalui pertimbangan tertentu, dalam arti orang yang terpilih sebagai informan dianggap mengerti dan menguasai berbagai informasi yang akan dibutuhkan peneliti selama melakukan penelitian (Sugiyono, 2016:216).

Penelitian ini juga menggunakan teknik snowball sampling. Peneliti menggunakan teknik snowball sampling karena memperhatikan pertimbangan tertentu yang kemungkinan akan dihadapi pada saat penelitian. Pertimbangan tersebut misalnya data yang didapatkan kurang dapat memenuhi kapasitas. Teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka

mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017: 218-219).

Dalam penelitian ini akan membutuhkan tiga jenis informan antara lain :

- 1) Informan kunci, yaitu informan yang dianggap mengetahui informasi penting terkait penelitian. Dalam penelitian ini, informan kunci yaitu Kepala Dinas atau pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- 2) Informan utama, yaitu informan yang terlibat secara teknis dan berkaitan langsung dengan tempat penelitian. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- 3) Informan tambahan, yaitu informan yang ditemukan di sekitar tempat penelitian serta dianggap dapat memberikan informasi terkait penelitian. Dalam penelitian ini informan tambahan yaitu masyarakat sekitar Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan yang terdaftar sebagai penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Tabel 2 Jumlah Informan Penelitian

Informan	Jabatan	Jumlah	Keterangan
Anjur Brutu, SE	Kasi Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 orang	Informan Kunci
Sanora Nasution	Kepala Desa Gunung Tua Jae	1 orang	Informan Utama
Siti Saroh	Masyarakat Penerima BLT	8 orang	Informan Tambahan
Salmah			
Paridah			
Ani			
Aminah			
Wardani			
Fatimah			
Hendra			
Jumlah		10 orang	

Sumber : Diolah peneliti, 2023

3.4 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang dapat ditafsirkan memberi makna pada analisis hubungan konsep. Analisis data dalam penelitian ini di ambil dari langkah-langkah yang digunakan oleh Lexi J. Maelong sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan.
2. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2017:247).
3. Deskripsi data, menguraikan secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan, data bias disajikan dalam bentuk uraian singkat.

4. Menarik kesimpulan, yaitu menerangkan uraian-uraian penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu analisa data yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan ini menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan pada suatu data tersebut.

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Wiratna Sujarweni (2014:73) menjelaskan bahwa lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di Kecamatan Panyabungan dan di Desa Gunung Tua Jae sebagai desa penerima BLT di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di Komplek Perkantoran Payaloting, Parbaungan. Peneliti memilih lokasi ini karena dari observasi atau pengamatan yang sudah dilakukan didukung dari beberapa sumber di artikel, peneliti menentukan bahwa lokasi tersebut memiliki karakteristik dan permasalahan yang ingin diteliti. Selain itu, peneliti juga yakin dan memahami lokasi tersebut dan berharap lokasi penelitian ini nantinya akan memberikan informasi maupun solusi bagi permasalahan tersebut.

Tabel 3 Uraian Waktu Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	2022			2023							2024	
		10	11	12	1	2	3	4	5	8	9	11	1
1.	Pengajuan Judul	■											
2.	Penyusunan Proposal		■	■									
3.	Seminar Proposal				■								
4.	Perbaikan Proposal					■	■						
5.	Pelaksanaan Penelitian						■						
6.	Penulisan Hasil Penelitian							■	■				
7.	Seminar Hasil									■			
8.	Perbaikan Skripsi										■	■	
9.	Sidang Meja Hijau												■

Sumber : diolah peneliti, 2023.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*displaydata*) dan penarikan kesimpulan (*verification*).

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang akan diteliti terkait Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Bantuan

Langsung Tunai (BLT) di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Panyabungan dan masyarakat sekitar.

2. Wawancara

Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara lisan. Bentuk informasi yang diperoleh bisa dinyatakan dalam tulisan atau di rekam secara audio visual. Esterberg dalam Sugiyono (2017:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung ataupun tidak langsung kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta masyarakat yang ada di Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, flim, gambar (foto), karya-karya monumental. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dideskripsikan di bab 4 tentang Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah berupaya melakukan perannya dengan cukup baik. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sebagai aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui kegiatan mendukung pemantauan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Gunung Tua Jae, sesuai dengan visi dan misinya berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Faktor-faktor yang menghambat peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah masih kurangnya SDM yang terintegritas (tujuan sesuai visi misi organisasi), terlambatnya jadwal pelaksanaan penyaluran/pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta kurangnya sebagian kepercayaan masyarakat akan

aktifitas serta kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal.

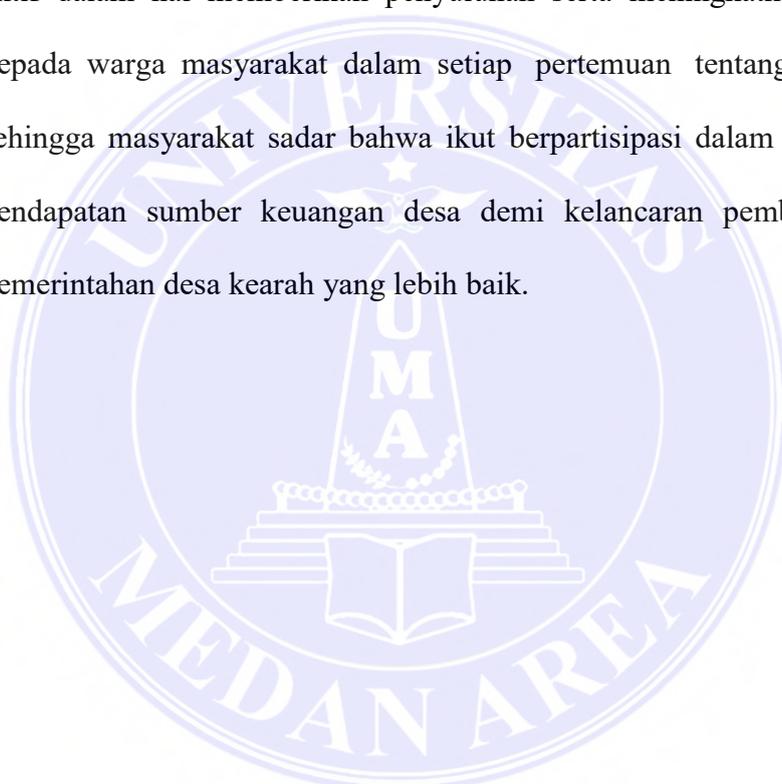
3. Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilihat dari indikator wewenang dapat disimpulkan bahwa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sudah menjalankan wewenangnya dengan baik sesuai mekanisme. Dari indikator tanggung jawab dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan kewajiban yang telah diberikan namun belum optimal. Pihak dinas dianggap kurang memperhatikan tentang bagaimana dana bantuan yang telah disalurkan kepada setiap desa, kurang dalam pemantauan penyaluran. Pada indikator kejelasan tujuan sudah baik, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan juga kepala desa sudah cukup memahami tugasnya dalam penyaluran BLT. Dan pada indikator cakupan pekerjaan belum terlaksana dengan baik untuk pengelolaan maupun pemantauan penyaluran bantuan langsung tunai.

5.2 Saran

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal harus mampu untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar pengelolaan dana tersebut dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah sehingga dapat dipergunakan masyarakat sesuai dengan aturannya.
2. Dengan adanya pengaturan hukum anggaran dana desa, pengelolaan anggaran dana desa dapat optimal sehingga dapat menunjukkan hasil yang maksimal seperti, adanya peningkatan pendapatan asli desa dan tingkat

pendidikan yang tinggi. Maka kepala desa dalam mengelola dana desa harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan setiap pengelolaan anggaran dan harus melibatkan setiap unsur-unsur masyarakat yang ada agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan adanya kesalahfahaman dalam penggunaan dana desa tersebut.

3. Kepala Desa Gunung Tua Jae beserta seluruh perangkat desa perlu berperan aktif dalam hal memberikan penyuluhan serta meningkatkan pembinaan kepada warga masyarakat dalam setiap pertemuan tentang dana desa, sehingga masyarakat sadar bahwa ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan sumber keuangan desa demi kelancaran pembangunan dan pemerintahan desa kearah yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: Percetakan Almuni, 1969).
- Bappenas. 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDana Desa)*. Jakarta: Kompak.
- Bawono, Icut Rangga .dan Setyadi. Erwin.2019 . *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Penerbit PTGrasindo.
- Departemen Sosial, R. I. (2008). *Petunjuk Teknis Program BantuanLangsung.Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran*. Depsos RI, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2019. *Pedoman Pelaksanaan ProgramKeluarga Harapan (PKH)*. Kementerian Sosial. Jakarta
- Lexi J. Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016). hlm. 112.
- Nugroho. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Oos, M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta,2014).
- Prawiradinata,Rudy S. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta : Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementrian PPN/Bappenas.
- Sugiyono. (2017). b. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung; Alfabeta.
- Soerjono Soekanto, dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press,2017.
- Sujarweni, Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Yayat M. Herujito."*Dasar-Dasar Manajemen*". (Jakarta: PT Grasindo), h. 3)

Artikel Ilmiah (Jurnal/Skripsi/Tesis)

- Amruddin (2021).Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal).
- Arimbawa, M. (2022). *Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batuan Kecamatan Sukawati*

- Kabupaten Gianyar (Disertasi Doktor, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Badan Pusat Statistik, Indikator Kemiskinan, Mandailing Natal : Badan Pusat Statistik, 2019, diakses 4 November 2022, pukul 21.12 Wib.
- Baso Iping, "Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)", dalam Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 1, Issue 2, Juli 2020, h.
- Borotan, FA (2021). Peran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam membantu pengelolaan keuangan masyarakat Desa Simaninggir Kabupaten Mandailing Natal (Disertasi Doktor, IAIN Padangsidempuan).hlm.15-16.
- Burhanuddin, B. (2021). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Duwipantara, M. N., & Atmadja, A. T. (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 12(2), 481-490.
- Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling," Jurnal Fokus Konseling 2, no. 2 (2016).
- Madea, Y., Laloma, A., & Londa, V. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi Publik, 3(046).
- Nurfianti, A. (2021). transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 di Desa Patani kabupaten Takalar. Digilibbadmin. Unismuh. Ac. Id, July, 1-23.
- Nur Puja, R. (2022). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Penyaluran BLT-DD Ditengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 06 Tahun 2020 (Studi Kasus Desa Sumber Salam Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso) (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- Petunjuk Teknis Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018.
- Rindorindo, PV, Mantiti, MS, & Pati, AB (2021).Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. TATA KELOLA , 1 (1).
- Rizal, A. (2022). Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah (Doctoral dissertation, Insitut Pemerintahan Dalam Negeri).

- Rizzo, House, dan Lirtzman dalam Partina, A. (2013). *Role ambiguity and role conflict sebagai anteseden dari job insecurity pada contingent worker*. Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis, 1(1)
- Ronta, H. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Masolo Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).hlm.22-23.
- Sinuhaji, A. S. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa di Kabupaten Karo.
- TNP2K, Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019 ,Edisi Juli, 2019, hal.1
- Ulhaq, M. (2022). Faktor Penghambat Pencairan Dana Perdesaan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 22 (3), 1900-1907.
- Wati, DL (2021). Peran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Ekonomi Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Kota Simalangang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Disertasi Doktor, Sultan Syarif Kasim Universitas Islam Negeri Riau).
- Weni, T. (2020). Analisis Proses Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket B Berbasis Kurikulum 2013 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda , dalam jurnal Papatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan , 16 (2), 89-95.

Peraturan / UU

- Undang-undang No.13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia.
- Peraturan Menteri Keuangan PMK No.222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021.
- Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin.

Website

<http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf>. (diakses 4 November 2022), h. 10-11

[https://kayubihi.desa.id/artikel/2022/10/18/penyaluran-blt-dana-desa-tahap-x-untuk-bulan-oktobertahun2022didesakayubihi2#:~:text=Besaran%20BLT%20Sesuai%20Pasal%2033,keluarga%20penerima%20manfaat%20\(KPM\)](https://kayubihi.desa.id/artikel/2022/10/18/penyaluran-blt-dana-desa-tahap-x-untuk-bulan-oktobertahun2022didesakayubihi2#:~:text=Besaran%20BLT%20Sesuai%20Pasal%2033,keluarga%20penerima%20manfaat%20(KPM)). Diakses 24 November 2022.

https://pemasdes.kapuashulukab.go.id/?page_id=399#:~:text=Dinas%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20dan%20Desa%20sebagaimana%20mempunyai%20tugas%20membantu%20bupati,tugas%20pembantuan%20yang%20diberikan%20kepada. Diakses 4 November 2022.



Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA GUNUNG TUA JAE KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Jadwal Wawancara

Tanggal :

Waktu :

B. Identitas Informan

Nama Informan :

Jenis Kelamin :

Usia :

Jabatan :

C. Pertanyaan Penelitian

Pedoman wawancara ini dibuat berdasarkan teori Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013) dengan indikator sebagai berikut:

1. Pertanyaan wawancara kepada Kepala Dinas dan Staff/Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Wewenang

1. Apa saja yang menjadi wewenang Bapak sebagai kepala dinas terkait program bantuan langsung tunai di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan wewenang selama bapak menjadi seorang kepala dinas di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana peranan bapak dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

Tanggung Jawab

1. Apakah Bapak sebagai kepala dinas sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik?
2. Jika Ya/Tidak, apa alasan bapak mengatakan hal tersebut?
3. Apakah ada hambatan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut?
4. Seperti apa wujud pertanggung jawaban dari kepala dinas ini pak? Apakah dalam bentuk laporan yang tertulis atau hanya lisan saja?

Kejelasan Tujuan

1. Menurut bapak apa yang menjadi visi ataupun tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini?
2. Apa saja faktor penghambat dalam mewujudkan tujuan tersebut?

3. Untuk mencapai tujuan tersebut apakah ada suatu kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa?

Pedoman Wawancara

A. Jadwal Wawancara

Tanggal :

Waktu :

B. Identitas Informan

Nama Informan :

Jenis Kelamin :

Usia :

Jabatan :

C. Pertanyaan Penelitian

Cakupan Pekerjaan

1. Apakah bapak bisa menjelaskan cakupan pekerjaan apa saja yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan dan Desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai di desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah ada hambatan dalam cakupan pekerjaan yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan dan Desa tersebut?
3. Menurut pendapat bapak, apakah bapak sudah menjalankan tugas sesuai dengan kedudukan yang sedang bapak jalani?
4. Jika Ya/Tidak, tolong dijelaskan kegiatan seperti apa yang sudah Bapak lakukan dalam pengelolaan bantuan langsung tunai di desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

2. Pertanyaan wawancara kepada Kepala Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Wewenang

1. Bagaimana peranan Ibu dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah ada hambatan dalam menjalankan peran tersebut?
3. Bagaimana prosedur pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat Kepala Desa di Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
4. Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum Musyawarah dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi dana BLT tersebut?
5. Kapan program Musrenbangdes atau Forum Musyawarah dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi dana BLT dilakukan?
6. Apakah ada hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan maupun pengelolaan dan BLT di Desa Gunung Tua Jae?
7. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut?

8. Apakah ada hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan program BLT di Desa Gunung Tua Jae?

Tanggung Jawab

1. Apakah Ibu sebagai kepala desa sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik terkait dengan pengelolaan bantuan langsung tunai di desa ini?
2. Jika Ya/Tidak, apakah ada hambatan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut?
3. Seperti apa wujud pertanggung jawaban dari aparat kepala desa ini Bu? Apakah dalam bentuk laporan yang tertulis atau hanya lisan saja?

Pedoman Wawancara

A. Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal :
Waktu :

B. Identitas Informan

Nama Informan :
Jenis kelamin :
Usia :
Jabatan :

C. Pertanyaan penelitian

Kejelasan Tujuan

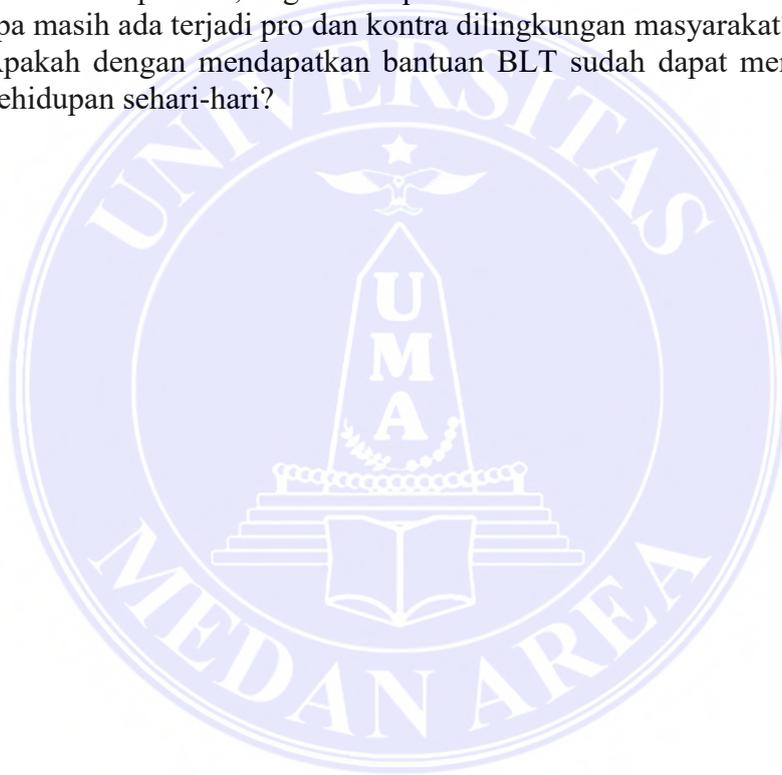
1. Menurut Ibu apa yang menjadi visi ataupun tujuan dari dibentuknya program bantuan langsung tunai ini?
2. Apakah program tersebut sudah berjalan di desa ini?
3. Untuk mencapai tujuan dari program tersebut apakah ada suatu kebijakan yang dikeluarkan desa Bu?
4. Apa upaya yang masyarakat lakukan dalam membantu tercapainya tujuan dari program tersebut?

Cakupan Pekerjaan

1. Apa saja yang menjadi cakupan pekerjaan Ibu dalam pengelolaan program bantuan langsung tunai di desa ini ?
2. Apakah ada hambatan dalam cakupan pekerjaan yang telah dilakukan dalam hal pengelolaan bantuan tunai langsung tersebut?
3. Menurut pendapat Ibu, apakah Ibu sudah menjalankan tugas sesuai dengan kedudukan yang sedang bapak jalani?
4. Jika Ya/Tidak, tolong dijelaskan kegiatan seperti apa yang sudah Ibu lakukan dalam pengelolaan bantuan langsung tunai di desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

3. Pertanyaan wawancara kepada masyarakat penerima manfaat BLT di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

1. Bagaimana pendapat Bapak/ibu mengenai program BLT di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu program tersebut sudah berjalan dengan baik?
3. Berapa besaran atau jumlah uang yang didapatkan dalam BLT yang ada di Desa Gunung Tua Jae?
4. Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BLT Tahun 2022? Dan bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat?
5. Menurut Bapak/ibu, Bagaimana pelaksanaan program BLT di Desa Gunung Tua Jae sampai saat ini apakah sudah berjalan secara efektif dan efisien?
6. Menurut Bapak/ibu, bagaimana pelaksanaan BLT di Desa Gunung Tua Jae apa masih ada terjadi pro dan kontra dilingkungan masyarakat?
7. Apakah dengan mendapatkan bantuan BLT sudah dapat mencukupi untuk kehidupan sehari-hari?



Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Gambar (1),(2) Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Anjur Brutu,S.E KASI DATA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Panyabungan, (2023)



Gambar (3),(4) Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Sanora Nasution Selaku Kepala Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, (2023)



Gambar(5), (6) Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Salma Masyarakat Penerima BLT Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, (2023)



Gambar (7) Wawancara dengan Ibu Yusnidar Masyarakat KPM Desa GunungTua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, (2023)



Gambar (8) Dokumentasi Laporan Penyaluran BLT dana desa tahap1 bulan Januari tahun 2023 Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan



Gambar (9) Dokumentasi Laporan Penyaluran BLT dana desa tahap 2 bulan Januari tahun 2023 Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan